

# RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

TAHUN 2023



DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KOTA CIMAHI



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk menjadi arahan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran perubahan tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana kerja Perubahan Tahun 2023 ini merupakan perbaikan terhadap Rencana kerja Tahun 2023 yang didasarkan dari analisa dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II dan juga dari perkembangan situasi kondisi terkini yang terkait program dan kegiatan.

Dokumen renja perubahan ini juga merupakan dokumen turunan dari dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cimahi Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat maksimal khususnya bagi pengembangan berkelanjutan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

**Cimahi,                    September 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAH**



**Dra. IPA LATIPAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19650227 199102 2 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b> .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	21
2.3. Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	24
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	38

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	9
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat	
Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Kota Cimahi s/d Triwulan II .....	
Tabel 2.2.	22
Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program	
s.d Triwulan II Tahun 2023.....	
Tabel.2.3	29
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi	
Disdukcapil .....	
Tabel 3.1	30
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Tahun	
2023 .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan OPD yang telah dilakukan perbaikan atau penyesuaian untuk periode pelaksanaan di bulan-bulan terakhir tahun anggaran, dokumen ini juga merupakan suatu manifestasi dari rentetan Rencana Strategis Dinas untuk masa Tahun 2023-2026 yang merupakan masa transisi antara berakhirnya Kepala Daerah yang lama hingga mendapatkan Kepala Daerah terpilih yang baru yang direncanakan pemilihannya akan dilakukan melalui pilkada serentak di tahun 2024 mendatang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menuangkan rencana program dan kegiatannya ke dalam Renja OPD yang berorientasi pada Pelayanan Publik tujuannya diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta untuk penerbitan dokumen kependudukan yang legalitasnya diakui semua pihak.

Sebagai bentuk kajian perencanaan dengan pertimbangan berbagai aspek, pada penyusunan dokumen perencanaan biasanya pendekatan yang digunakan adalah:

- a) Pendekatan Politik; merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
- b) Pendekatan Teknokratik; yaitu menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor dan lintas pelaku.
- c) Pendekatan Partisipatif; yaitu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.

- d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Dikarenakan saat ini tidak terdapat kepala daerah yang terpilih secara politik, maka dalam penyusunan dokumen perencanaannya dimana diantaranya adalah dokumen renja perubahan ini tidak diperlukan adanya pertimbangan dalam aspek pendekatan politik.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Daerah Kota Cimahi.
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Wali kota dengan kewenangan yang meliputi:

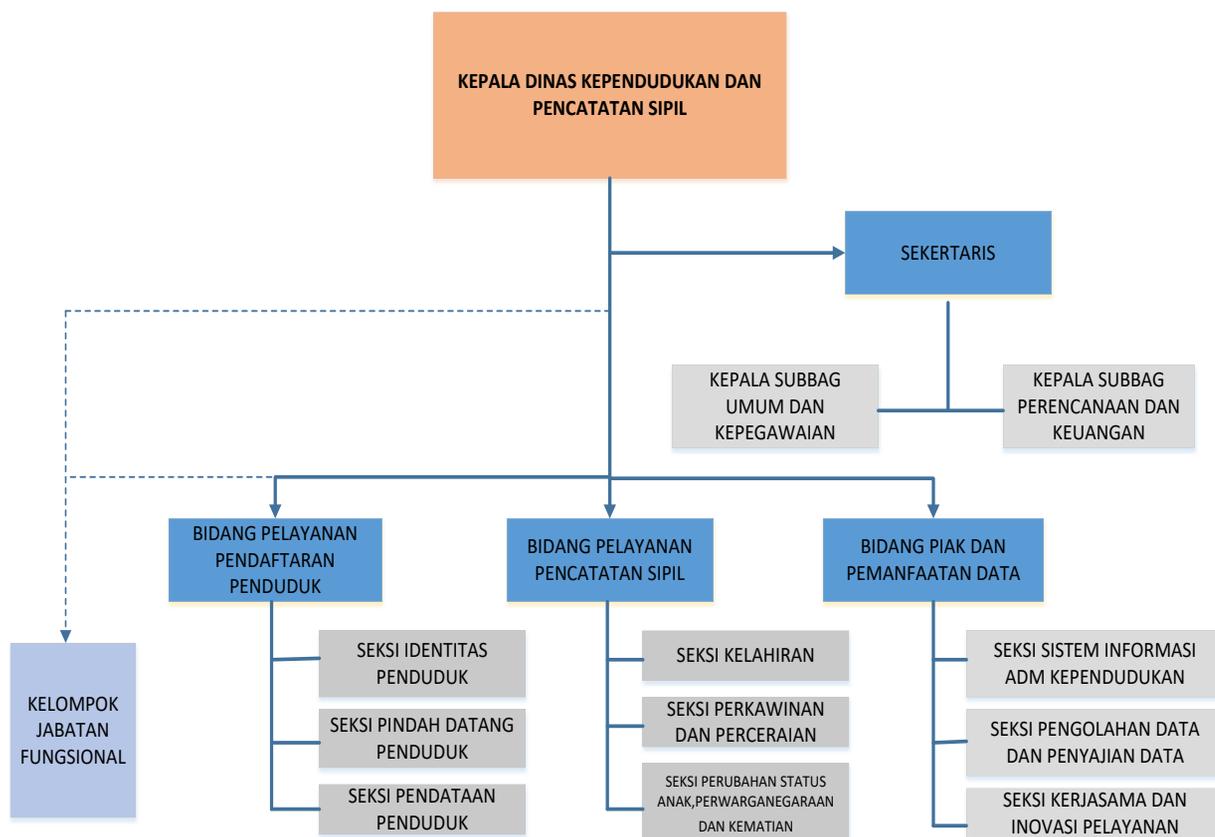
- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.
- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota.
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- h. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak/tanpa dipungut biaya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menunjukkan makin seriusnya upaya pemerintah dalam penataan yang berkaitan dengan kependudukan.

Pembentukan Dinas kependudukan yang organisasinya mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4750) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang Dinas daerah kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2011 tentang Dinas daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka dibentuklah perangkat daerah yang khusus menangani urusan administrasi kependudukan .

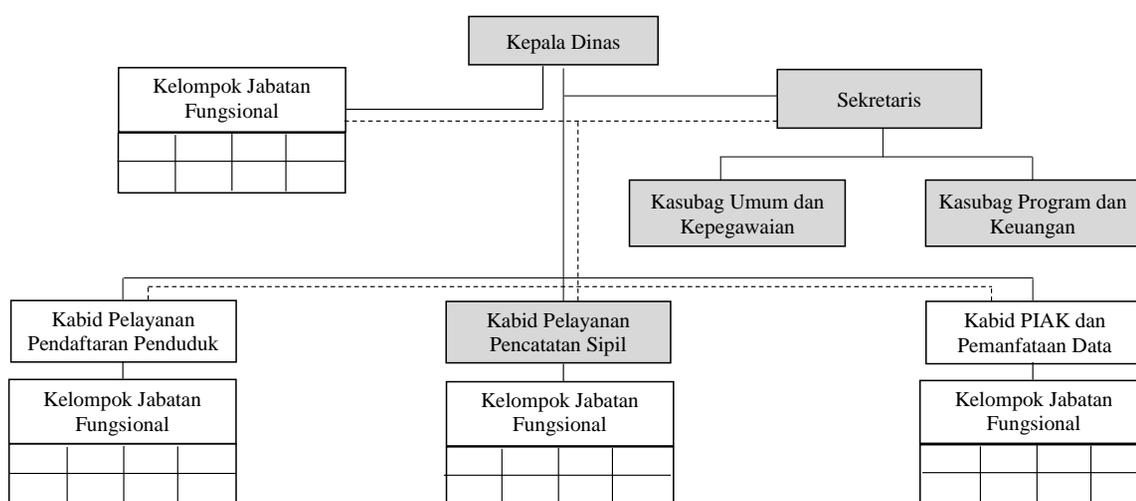
**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016**



Menyesuaikan dengan ketentuan pusat, pada tahun 2016 struktur organisasi Disdukcapil mengalami sedikit perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Adapun struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar 1.1.

Pada tahun 2021, dengan adanya himbauan dari Presiden terkait penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi di instansi pemerintahan menjadi hanya dua level saja, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, struktur organisasi perangkat Daerah di Kota Cimahi termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengalami sedikit penyesuaian yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 dimana semua jabatan administratif pengawas terkecuali di sekretariat mengalami penyetaraan jabatan menjadi jabatan fungsional muda.

**Gambar 1.2. Struktur Organisasi  
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cimahi  
berdasarkan Peratuan Wali kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021**



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023 yaitu mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan yang berbeda-beda serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Tujuannya adalah sebagai Pedoman rencana organisasi dalam mewujudkan program dan kegiatan pelayanan publik yang lebih baik dan berkesinambungan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

#### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II**

Memuat hasil capaian baik segi sasaran maupun Kegiatan oleh PD sampai dengan Triwulan II 2023, analisa kinerja pelayanan disdukcapil, isu atau pokok utama yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan Tupoksi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

#### **Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat tentang program dan kegiatan beserta pendanaannya

#### **Bab IV Penutup**

Memuat kaidah-kaidah sebagai pedoman dan komitmen Kepala Dinas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang makin dinamis.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel yakni kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam hal pelaporan maka metoda yang dipakai adalah melakukan pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan Kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja Kegiatan.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II**

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan dengan cara membandingkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2023-2026 pada awal tahun

Dalam pelaksanaan program dan Kegiatan hanya terdapat 1 Program Penunjang dan 4 Program Urusan, dengan 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan target dan realisasi seperti pada penjelasan tabel sebagai berikut : (Terlampir **Tabel 2.1.** Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II).

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi**  
**Sampai Dengan Triwulan II**

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. TW II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai	38 (C) Indeks	11.107.080.740	N/A	4.440.239.365	0%	39,98%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,00		82,02		101,26%				
		Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	Persen	96,25%		89,81%		93,31%				
		Prosentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	Persen	100%		N/A		0%				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	50,00	9.545.129.923	N/A	3.904.781.777	N/A	40,91%		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,50		N/A		N/A			
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Dokumen	24	190.996.300	12	20.432.750	50,00%	10,70%		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10		4		15.066.750		40,00%	14,40%
			2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14		8		5.366.000		57,14%	6,21%
	II	3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	6.788.940.710	1	3.173.748.065	50,00%	46,75%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/bulan	46	37		3.169.481.265		80,43%		46,73%	

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. TW II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.722.000	1	3.470.000	100,00%	93,23%
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	3.258.000	0	796.800	0,00%	24,46%
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	Orang	63	40.105.750	59	39.769.550	93,65%	99,16%
	6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket						
	7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang						
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	63	40.105.750	59	39.769.550	93,65%	99,16%
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	Bulan	12	1.967.878.943	3	494.138.080	25,00%	25,11%
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.577.493.329	2	297.966.735	40,00%	18,89%
	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12.850.470	0	6.191.030	0,00%	48,18%
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	58.187.110	1	29.967.200	50,00%	51,50%
	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	81.214.034	1	44.986.610	50,00%	55,39%
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	10.000.000	3	3.892.000	50,00%	38,92%

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. TW II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	225.032.000	75	110.249.505	75,00%	48,99%
	15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.102.000	0	885.000	0,00%	28,53%
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Unit	1	83.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	83.250.000	0	0	0,00%	0,00%
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	130.816.100	12	54.305.967	50,00%	41,51%
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	19.224.000	6	8.789.285	50,00%	45,72%
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	111.592.100	6	45.516.682	50,00%	40,79%
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	343.142.120	6	76.709.365	50,00%	22,35%
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	213.298.120	5	76.709.365	125,00%	35,96%
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	129.844.000	40	45.678.000	44,44%	35,18%

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. TW II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	99%	468.461.448	N/A	168.724.250	N/A	36,02%
			Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	Persen	90%		N/A		N/A	
VIII	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	160.000	333.417.448	36.418	127.050.250	22,76%	38,11%
	21	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	250	15.468.000	141	3.784.800	56,40%	24,47%
	22	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	317.949.448	6	123.265.450	50,00%	38,77%
IX	Penataan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	17.000	90.842.000	3.536	23.582.000	20,80%	25,96%
	23	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	11.835	90.842.000	3536	23.582.000	29,88%	25,96%
X	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	44.202.000	6	18.092.000	50,00%	40,93%
	24	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	400	8.250.000	1139	3.440.000	284,75%	41,70%
	25	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	3	35.952.000	1	14.652.000	33,33%	40,75%

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. TW II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun		Persen	96,00%	551.706.919	97,09%	119.950.971	101,14%	21,74%	
	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		Persen	100%		N/A		100,00%		
	Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		Persen	100%		74,27%		74,27%		
	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan		Persen	100%		57,20%		57,20%		
XI	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	15.000	368.314.200	8.226	82.953.671	54,84%	22,52%
	26	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	20	368.314.200	4	82.953.671	20,00%	22,52%
XII	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	23	143.139.100	3	9.972.000	13,04%	6,97%
	27	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12	69.710.850	3	9.972.000	25,00%	14,30%
	28	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	10	73.428.250	0	0	0,00%	0,00%
XIII	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	1	40.253.619	1	27.025.300	100,00%	67,14%
	29	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	40.253.619	1	27.025.300	100,00%	67,14%

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. TW II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	Persen	30%	515.018.550	41,38%	187.272.388	120,00%	36,36%
				Persen	90%		98%		109%	
XIV	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	PD	10	116.422.450	12	46.255.662	120,00%	39,73%
	30	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	2	98.422.450	1	37.349.162	50,00%	37,95%
	31	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui hak akses	Dokumen	5	18.000.000	2	8.906.500	40,00%	49,48%
XV	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	24	367.598.900	12	110.029.526	50,00%	29,93%
	32	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	200.889.950	6	64.869.537	50,00%	32,29%
	33	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	12	166.708.950	6	45.159.989	50,00%	27,09%
XVI	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	30.997.200	1	30.987.200	100,00%	99,97%

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. TW II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	34	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	30.997.200	1	30.987.200	100,00%	99,97%
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaatkan profil kependudukan	Persen	100%	26.763.900	0%	1.518.300	0,00%	5,67%
	XVII	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	OPD	29	26.763.900	0	1.518.300	0,00%	5,67%
	35	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1	26.763.900	0	1.518.300	0,00%	5,67%

Secara umum kinerja pelaksanaan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Baik sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah maupun sub kegiatan 1) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah secara umum kedua sub kegiatan ini dapat terlaksana dengan sesuai rencana hanya saja terdapat anggaran yang belum dapat terserap yakni honor narasumber.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak dapat diserap sesuai rencana karena jumlah pegawai dan formasi jabatannya tidak terisi penuh sesuai yang diperkirakan.

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dapat dilaksanakan sesuai rencana.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dapat terlaksana sesuai rencana.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada tahun ini, Disdukcapil mendapat bantuan keuangan (banprov) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1 (satu) milyar rupiah untuk peningkatan sarana dan prasarana administrasi kependudukan khususnya peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el. Anggaran tersebut dimasukkan ke dalam Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. Pelaksanaan Sub kegiatan ini baik yang berasal dari dana APBD maupun banprov

tidak mengalami kendala yang berat, kendalanya hanya masalah pencairan anggaran dari banprov saja yang agak terhambat karena harus menunggu tanda tangan Walikota yang sedang melaksanakan ibadah Umrah.

Untuk sub kegiatan lainnya yakni sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya baru akan dilaksanakan di akhir tahun sesuai rencana.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dapat dilaksanakan sesuai rencana

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 sub kegiatan, pertama sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub kegiatan dapat dilaksanakan tanpa ada kendala berarti. Adapun sub kegiatan kedua yakni Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dilihat dari perjalanan pelaksanaan sub kegiatan ini ternyata masih diperlukan tambahan anggaran agar dapat menutupi semua kebutuhan pemeliharaan perangkat kerja yang ada.

## **A. Program Pendaftaran Penduduk**

### 8. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi merupakan upaya pengawasan terkait proses pelaporan administrasi kependudukan di Kota Cimahi khususnya penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan. Realisasi sub kegiatan ini sedikit terlambat namun tidak menjadi hambatan untuk akan tetap melaksanakannya hingga selesai.

- Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub kegiatan ini berisi pembayaran THL, mamin rapat dan lembur pegawai dalam rangka mendukung pelayanan pendaftaran penduduk. Pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala dan akan dilaksanakan sesuai rencana.

### 9. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

Terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan. Pada sub kegiatan ini, direncanakan dilakukan pengurangan anggaran pembelian blangko KIA, diakrenakan stok blangko KIA saat ini masih mencukupi.

### 10. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- Sub kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk. Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak memiliki ekndala berarti namun diperlukan adanya penambahan volume pekerjaan yang berimbas penambahan anggaran untuk pelaksanaan perekaman KTP-el di hari libur dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak.

- Sub kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk, pelaksanaan sub kegiatan ini ditunda dikarenakan perlu adanya penambahan anggaran agar jumlah pesertanya mencukupi.

## **B. Program Pencatatan Sipil**

### 11. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, sebagian besar sub kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, hanya saja pada sub sub kegiatan RW tuntas anggaran pendukungnya masih dirasa kurang.

### 12. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Sub kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil. Disesuaikan dengan kondisi dan data yang lebih valid, direncanakan akan dilakukan pengurangan jumlah atau volume kegiatan yang disertai pengurangan anggaran.
- Sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil, Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami kendala dan akan dilaksanakan sesuai rencana.

### 13. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil. Kegiatan masih dapat dilaksanakan namun ada sedikit perubahan meaknisme pelaksanaan kegiatan yang berimbasa adanya anggaran yang tidak diserap.

## **C. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

### 14. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- Sub kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami kendala dan akan dilaksanakan sesuai rencana.
- Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami kendala dan akan dilaksanakan sesuai rencana.

15. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan sub kegiatan ini memang belum sepenuhnya sesuai jadwal yang direncanakan tapi bukan karena mengalami kendala yang berarti sehingga kegiatan akan dilaksanakan hingga tuntas sesuai rencana.

- Sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Pada sub kegiatan ini terdapat anggaran internet yang tidak diserap dikarenakan sudah disediakan oleh MPP. Anggarannya direncanakan akan dialihkan untuk kebutuhan sosialisasi atau pemberan informasi kepada masyarakat melalui melalui kegiatan talkshow radio yang akan menghadirkan narasumber yang kompeten.

16. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan. Sub kegiatan ini sepenuhnya telah selesai dilaksanakan.

**D. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

17. Penyusunan Profil Kependudukan

- Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain. Pelaksanaan sub kegiatan ini belum mengalami kendala karena sesuai rencana baru akan dilaksanakan di triwulan III.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk;
2. Pencatatan peristiwa penting;
3. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk;
4. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil;
5. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting.

Sebagai unit pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya pelayanan kependudukan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan pemerintah di kecamatan;
- b. Telah melaksanakan inovasi pelayanan publik dalam hal pelayanan dokumen kependudukan, yaitu dengan menerapkan sistem paket pelayanan “ *Three in one* ”, Pelayanan untuk penyandang disabilitas dan RW Tuntas yang merupakan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke RW yang telah ditentukan;
- c. Telah melaksanakan pelayanan daring melalui pengembangan aplikasi pelayanan adminduk Kota Cimahi, yang diberi nama DILANDA CITA yang merupakan kependekan dari Digitalisasi Pelayanan Adminduk Cimahi Kota, sejak akhir tahun 2022. Sebelumnya Disdukcapil Kota Cimahi juga sudah pernah melaksanakan pelayanan daring seperti ini melalui aplikasi (SIPADE, SIBENAR) dengan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Bandung, namun aplikasi ini tidak dapat digunakan lagi atau terhenti di awal tahun 2022 akibat adanya kebijakan SIAK terpusat dari Kemendagri.

- d. Telah melaksanakan stelsel aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem pelayanan keliling baik menggunakan mobil pelayanan keliling maupun ke rumah warga untuk pelayanan yang sakit, jompo dan atau disabilitas;
- e. Telah dilakukannya percepatan pelayanan perekaman KTP Elektronik ke sekolah- sekolah, pelayanan pada hari libur, sabtu dan minggu sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP Elektronik. Saat ini kegiatan percepatan perekaman KTP-el ini menjadi lebih penting karena berkaitan dengan data pemilih pada pileg, pilpres dan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dapat disimak dalam matrik dibawah ini:

**Tabel. 2.2 Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program s.d Triwulan II Tahun 2023**

<b>Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Kinerja 2023</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja s.d. TW II</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Keterangan</b>
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai	38 (C) Indeks	-	-	Data belum tersedia
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,00	82,02	101,26%	
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	Persen	96,25%	89,81%	93,31%	
Prosentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	Persen	100%	100%	100%	
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	50,00	-	-	Data belum tersedia
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,50	-	-	Data belum tersedia
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	99%	98,0%	99,0%	
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	Persen	90%	74,3%	82,6%	

<b>Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Kinerja 2023</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja s.d. TW II</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Keterangan</b>
Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	Persen	96,00%	97,09%	101,14%	
Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100%	100%	100,00%	
Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100%	100%	100%	
Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	100%	100%	100%	
Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	Persen	30%	41,38%	120,00%	
SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	Persen	90%	98%	109%	
Persentase OPD yang memanfaatkan profil kependudukan	Persen	100%	-	-	Dilaksanakan di TW 3

Dari matrik diatas terlihat bahwa ada beberapa data realisasi yang belum terisi. Untuk penilaian RB, Indeks Profesional ASN dan SAKIP penilaiannya dilakukan setahun sekali dan hasilnya baru keluar di awal tahun di tahun berikutnya.

Untuk data cakupan yang sudah ada, dapat di simpulkan secara umum bahwa pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sudah cukup baik dimana pada sebagian besar indikator diantaranya capainnya sudah hampir mencapai target bahkan ada yang sudah melewati target.

Indikator yang capaiannya belum mencapai target diantaranya yakni Cakupan Kartu identitas Anak, hal ini diantaranya karena masyarakat

masih belum menganggap bahwa dokumen ini penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena sudah ada bukti identitas lain seperti kartu pelajar.

Upaya-upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat selalu diupayakan diantaranya melalui sosialisasi yang disampaikan baik secara tatap muka maupun melalui media seperti leaflet/brosur, media sosial, video conference maupun melalui kegiatan pelayanan keliling.

Adanya pelayanan yang bersifat penyisiran di RT/RW berupa kegiatan RW tuntas administrasi kependudukan diharapkan dapat membantu meningkatkan cakupan, namun saat ini dikarenakan berbagai keterbatasan hanya dapat dilaksanakan pada 15 RW untuk 15 kelurahan, jumlah tersebut belum cukup dikarenakan secara proporsi jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan.

Pencapaian cakupan KTP-el mengalami masih menyisakan 2% penduduk yang belum memiliki KTP-el. Jumlah ini cukup dianggap cukup besar terutama apabila dikaitkan dengan persiapan menghadapi pileg, pilpres dan pilkada serentak. Diperlukan usaha yang lebih kerasa dalam rangka menggenjot jumlah perekaman dan pencetakan ktp-el baik melalui pelayanan-pelayanan non reguler seperti pelayanan jemput bola dan juga pelayanan di hari libur agar masyarakat yang tidak sempat mengurus KTP-el di hari kerja karena kesibukannya masih dapat mengurus KTP-el di hari Libur.

### **2.3 Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tupoksi**

Dengan perkembangan regulasi, pengembangan Informasi Teknologi serta respon atas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat maka isu-isu penting yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi hambatan berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan dan sarana/prasarana yang belum memadai. Hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit

pelayanan lain di Kota Cimahi sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan tetap.

2. Tidak dimilikinya lagi database kependudukan lokal. Dengan beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat serta dihapusnya database kependudukan lokal di masing masing Disdukcapil daerah menyebabkan berbagai kendala diantaranya dalam hal pengolahan data dan pemanfaatan data untuk berbagai kepentingan di pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya pemutakhiran data penduduk terutama masih adanya data warga yang sudah meninggal namun masih tercantum di database;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi atau perangkat daerah. Hal ini terutama akibat adanya ketentuan bahwa pengguna akses data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data;
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pelayanan daring oleh masyarakat. Keberadaan pandemi virus Covid-19 memaksa adanya perubahan dalam mekanisme pelayanan agar bisa menekan kerumunan dan interaksi fisik antar manusia, sehingga dibangun suatu mekanisme pelayanan baru yang minim interaksi tatap muka yakni dengan pelayanan secara daring. Namun ternyata tidak semua masyarakat mampu dan atau mau memanfaatkan jenis pelayanan daring tersebut. Walaupun sebenarnya menggunakan pelayanan daring akan lebih mudah dan efisien, tapi mayoritas masyarakat masih saja lebih memilih pelayanan secara konvensional dengan datang ke tempat pelayanan agar dapat secara langsung berinteraksi dengan petugas.
7. Persiapan pileg, pilpres dan pemilukada serentak tahun 2024. Perlu dilakukan percepatan perekaman KTP-el terutama bagi

calon pemilih pemula. Perekaman bagi calon pemilih pemula dapat dilakukan terhadap penduduk yang berumur dibawah 17 tahun namun pada hari pencoblosan pemilu nanti usianya sudah mencapai 17 tahun.

Memperhatikan isu tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan Disdukcapil menjadi program kegiatan prioritas Kota Cimahi dengan pencapaian misi Kota yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**. Dampak yang diharapkan secara signifikan yaitu dengan meningkatnya nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Disdukcapil.

Dalam rangka mengantisipasi isu tentang Tupoksi di atas maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tupoksi itu sendiri dan dapat ditelaah dalam matrik tabel 2.3. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan kembali sebagai berikut :

#### 1. Faktor Intern Organisasi

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik yang terkait langsung dengan penanganan teknis administratif, produk hardcopy/kearsipan maupun yang berbasis Informasi teknologi;
- b. Belum mantapnya sinkronisasi koordinasi masing-masing unsur pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan dan instansi vertikal dalam penanganan pelayanan;
- c. Masih kurangnya peralatan serta jaringan yang mendukung kelancaran tugas di masing-masing tingkatan organisasi;
- d. Budaya kerja yang masih lemah;
- e. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;

#### 2. Faktor Ektern Organisasi

- a. Kebijakan SIAK terpusat dan penghapusan database kependudukan lokal;
- b. Kebijakan syarat kewajiban melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data bagi pengguna akses data;
- c. Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan;
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;

- e. Masih lemahnya literasi digital masyarakat terutama dalam menggunakan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan.

**Tabel.2.3**

**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Disdukcapil**

Aspek kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan
			Internal	External	
Pra Sarana	Sewa rumah untuk gudang arsip		Gudang Arsip		Arsip aktif rawan rusak dan hilang
Sarana	Jumlah dan atau kondisi dan atau spesifikasi Peralatan pendukung pelayanan belum memadai	Analisa kebutuhan	Pendanaan Kurang		Pelayanan terganggu, kurang maksimal
SDM	Tidak memadai	Analisa Beban kerja	Jumlah SDM		
			Kualifikasi SDM		
Validitas dan akurasi data	Masih terdapat data ganda, adanya penduduk yang sudah meninggal namun masih terdata di database	Data DKB	Pendanaan kurang, Kesadaran masyarakat kurang		Validitas dan akurasi data kurang memadai
Kepemilikan KTP-el sebagai syarat pemilih pemilu	Terekam 98%	KTP-el 100%	Jumlah SDM		Capaian belum maksimal
Pemanfaatan data kependudukan	Pengajuan hak akses pemanfaatan data terhambat			Ketentuan pelaksanaan ISO 27001 bagi pengguna hak akses data	

Meskipun banyak hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tupoksi pada prinsipnya secara keseluruhan relative tidak terpengaruh dengan visi dan misi kepala daerah, provinsi, nasional maupun internasional /MDGs mengingat Tupoksi yang dijalankan sebagai lembaga administratif yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Mengingat perubahan “*mindset*” Negara dalam penanganan administrasi kependudukan sebagai suatu yang strategis, tantangan yang timbul justru ada pada sikap proaktif aparatur, dukungan pendanaan yang

memadai sekaligus sebagai bentuk peluang dari lembaga pelaksana dalam mengembangkan potensi guna di dapat tingkat cakupan pelayanan

Beberapa rekomendasi atau catatan penting yang menjadi fokus anatra lain cara penyisiran masyarakat yang belum memiliki dokumen adminduk melalui RW tuntas secara bertahap dan dinamis, pengembangan pelayanan online, pelayanan khusus penyandang disabilitas, pelayanan jemput bola, pelayanan hari libur serta pengembangan model sosialisasi yang lebih baik.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada anggaran perubahan tahun 2023 tidak mengalami banyak perubahan dimana masih terdiri dari 5 program 17 Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Adapun jumlah anggaran mengalami peningkatan dimana sebesar Rp.1.331.471.896,- dari semula sebesar Rp. 10.107.080.740,- menjadi Rp. 11.438.552.636,-. Dari besaran peningkatan tersebut, sebagian besar yakni 1 (satu) milyar rupiah diantaranya merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah masuk ke dalam DPA akhir triwulan 1 melalui mekanisme pergeseran anggaran dan sisanya sebesar Rp.331.471.896,- merupakan rencana tambahan anggaran dalam APBD perubahan.

Adanya penambahan anggaran dari provinsi tidak menambah jumlah sub kegiatan karena dimasukkan ke salah satu sub kegiatan dalam sudah ada yakni sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan perubahan Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										<b>10.107.080.740</b>	<b>11.438.552.636</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>8.545.129.923</b>	<b>9.872.972.357</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>190.996.300</b>	<b>190.980.300</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	12 bulan	12 bulan	104.627.000	101.182.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	14 Laporan	14 Laporan	12 bulan	12 bulan	86.369.300	89.798.300
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>6.788.940.710</b>	<b>6.770.412.606</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang baik	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	46 Orang/ bulan	46 Orang/ bulan	12 bulan	12 bulan	6.781.960.710	6.763.432.606
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang baik	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	3.722.000	3.722.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya pengelolaan adminsitrasi keuangan yang baik	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	3.258.000	3.258.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>40.105.750</b>	<b>40.105.750</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik	50.00 Nilai	50.00 Nilai	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik	50.00 Nilai	50.00 Nilai	63 Orang	63 Orang	12 bulan	12 bulan	40.105.750	40.105.750
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>967.878.943</b>	<b>2.327.907.481</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pengelolaan adminsitrasi umum	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	4 Paket	6 Paket	12 bulan	12 bulan	577.493.329	1.878.901.247
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pengelolaan adminsitrasi umum	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	12.850.470	12.850.470
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pengelolaan adminsitrasi umum	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	2 Paket	2 Paket	12 bulan	12 bulan	58.187.110	63.187.110

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	2 Paket	3 Paket	12 bulan	12 bulan	81.214.034	93.131.654
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	6 Laporan	6 Laporan	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	100 Laporan	57 Laporan	12 bulan	12 bulan	225.032.000	266.735.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	3.102.000	3.102.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>83.250.000</b>	<b>83.250.000</b>
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BB Nilai	BB Nilai	1 Unit	1 Unit	12 bulan	12 bulan	83.250.000	83.250.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>130.816.100</b>	<b>132.316.100</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	19.224.000	20.724.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	50.00 Nilai BB Nilai	50.00 Nilai BB Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	111.592.100	111.592.100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>343.142.120</b>	<b>328.000.120</b>

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BB Nilai	BB Nilai	4 Unit	4 Unit	12 bulan	12 bulan	213.298.120	213.298.120
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BB Nilai	BB Nilai	90 Unit	79 Unit	12 bulan	12 bulan	129.844.000	114.702.000
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>										<b>468.461.448</b>	<b>524.996.910</b>
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>										<b>333.417.448</b>	<b>333.544.810</b>
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	90 persen 99 persen	90 persen 99 persen	250 Dokumen	250 Dokumen	12 bulan	12 bulan	15.468.000	15.468.000
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	90 persen 99 persen	90 persen 99 persen	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	317.949.448	318.076.810
<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>										<b>90.842.000</b>	<b>53.582.000</b>
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Terpenuhinya kebutuhan penataan pendaftaran penduduk	99 persen	99 persen	11835 Dokumen	5000 Dokumen	12 bulan	12 bulan	90.842.000	53.582.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>									<b>44.202.000</b>	<b>137.870.100</b>	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pendukung penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk	90 persen 99 persen	90 persen 99 persen	400 Dokumen	2000 Dokumen	12 bulan	12 bulan	8.250.000	53.750.000
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pendukung penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk	90 persen 99 persen	90 persen 99 persen	3 Laporan	3 Laporan	12 bulan	12 bulan	35.952.000	84.120.100
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>									<b>551.706.919</b>	<b>522.906.919</b>	
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>									<b>368.314.200</b>	<b>380.314.200</b>	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait dokumen pencatatan sipil	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	4 Layanan	4 Layanan	12 bulan	12 bulan	368.314.200	380.314.200
<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>									<b>143.139.100</b>	<b>114.339.100</b>	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya pendukung penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	69.710.850	40.910.850
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Terlaksananya pendukung penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	10 Laporan	10 Laporan	12 bulan	12 bulan	73.428.250	73.428.250
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>										<b>40.253.619</b>	<b>28.253.619</b>

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil yang optimal	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	100 persen 96 persen 100 persen 100 persen	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	40.253.619	28.253.619
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>										<b>515.018.550</b>	<b>490.912.550</b>
<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>										<b>116.422.450</b>	<b>116.422.450</b>
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Termanfaatkannya data kependudukan oleh stakeholder dan masyarakat	30 persen	30 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	12 bulan	12 bulan	98.422.450	98.422.450
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Termanfaatkannya data kependudukan oleh stakeholder dan masyarakat	30 persen	30 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>										<b>367.598.900</b>	<b>343.492.900</b>
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90 persen	90 persen	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	200.889.950	200.889.950

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
				Program		Keluaran Sub Keg		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90 persen	90 persen	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	166.708.950	142.602.950
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>										<b>30.997.200</b>	<b>30.997.200</b>
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terselenggaranya pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang optimal	90 persen	90 persen	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	30.997.200	30.997.200
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>										<b>26.763.900</b>	<b>26.763.900</b>
<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>										<b>26.763.900</b>	<b>26.763.900</b>
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Termanfaatkannya Profil Kependudukan oleh Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	29 PD	29 PD	26.763.900	26.763.900
<b>TOTAL</b>										<b>10.107.080.740</b>	<b>11.438.552.636</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2023 dan menjadi acuan bagi kepala Perangkat Daerah agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, oleh karena itu perlu dipedomani kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Renja Perubahan PD Tahun 2023 akan menjadi bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran.
2. Dalam rangka sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan yang berbeda (APBD, APBN/BLN) maka OPD dalam membuat Renja perubahan ini sesuai dengan sumber anggaran.
3. Setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kepada Wali kota melalui Kepala Bappeda.
4. RKPD dan Renja Perubahan PD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tahun 2023 diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi.